

# Peran Birokrasi dalam Reformasi Pemerintahan Indonesia

Ikhlusal Amal<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

<b>ABSTRACT</b> Public issue often involve bureaucracy due to the frequent corruption or embezzlement of government officials. In addition, the problem is also related to convoluted regional development and other things that require money in their resolution, which causes the public to feel unacceptable with the negative effects of government bureaucracy. This article aims to provide a space for public information about the development of government in Indonesia seen from the role of bureaucracy. This study uses a literature study method. Bureaucracy in Indonesia is a very important study to discuss because it aims to change the Indonesian government system from the old to a new bureaucratic reform to improve the welfare of the Indonesian people at present and in the future.	<b>CONTACT</b> <a href="mailto:amalikhlasul232@gmail.com">amalikhlasul232@gmail.com</a>
<b>ABSTRAK</b> Birokrasi sering muncul dalam permasalahan publik yang erat kaitannya dengan aparat pemerintahan yang sering melakukan korupsi atau penggelapan uang. selain itu juga permasalahannya terkait dengan pembangunan daerah yang berbelit-belit dan hal lainnya yang membutuhkan uang dalam penyelesaiannya yang menyebabkan masyarakat merasa tidak terima dengan adanya efek negatif birokrasi pemerintahan itu. Jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang informasi publik tentang perkembangan pemerintahan di Indonesia dilihat dari peran birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Birokrasi di Indonesia menjadi kajian yang sangat penting untuk dibahas karena bertujuan untuk merubah sistem pemerintahan Indonesia dari yang lama menjadi reformasi birokrasi yang baru untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia di pada saat ini dan masa yang akan datang	<b>KEYWORDS</b> Peran Birokrasi, Reformasi, Pemerintahan Indonesia  Received: 05/03/2024 Revised: 25/03/2024 Accepted: 20/04/2024 Online: 30/04/2024 Published: 30/04/2024  Al-ijtima'i is licenced under a <a href="#">Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence (CC-BY-SA)</a>

## INTRODUCTION

Perkembangan birokrasi di Indonesia secara historis tak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme yang mengubah sifat dan peran birokrasi tradisional yang dimiliki kerajaan-kerajaan di nusantara. Transformasi ini tentu saja tidak terpisahkan dari latar belakang politik ekspansi yang menjadi kecenderungan di negara-negara eropa pada masa itu. Penataan birokrasi kemudian menjadi kebutuhan pokok pemerintah kolonial akan keteraturan administratif yang pada akhirnya akan memicu stabilitas sosial politik (syarifuddin, 2023).

Secara umum, birokrasi adalah kelompok sosial yang vital dengan kekuasaan dan hak istimewa, meskipun bekerja di bawah tatanan politik (Akbar et al., 2021). Dari pendapat tersebut diketahui bahwa birokrasi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan dan hak istimewa yang berhubungan dengan dunia politik. Kaitan antara birokrasi dan politik itu sudah sejak awal pembentukan birokrasi sudah ada, dua hal tersebut sangat terkait dikarenakan birokrasi bagian dari politik, disebut juga tipe organisasi untuk melaksanakan tugas pemerintahan modern dalam sistem administrasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan.

Birokrasi dan politik adalah dua lembaga yang memiliki perbedaan namun sulit untuk dipisahkan. Hodgetts, (1946) meskipun pada tahun 1900, Frank J. Goodnow mencoba untuk menguraikan perbedaan antara keduanya melalui paradigma politik dan administrasi dalam bukunya yang berjudul *Politic and Administration*, namun tampaknya garis pemisahan yang ia gambarkan menjadi kabur dalam konteks pemerintahan modern saat ini (Dwijayanti, 2021). Sebaliknya, hubungan antara politik dan administrasi menjadi lebih dinamis daripada yang diharapkan, dan tidak lagi membentuk pemisahan yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan peran birokrasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam ranah politik.

Sejarah dan konsep birokrasi menggambarkan bahwa birokrasi di Indonesia merupakan hasil dari warisan kultur budaya feodalisme dan kolonialisme, yang cenderung bersifat feodalis patrimonial (Damanhuri, D., & Jawandi, 2017). Dalam sistem birokrasi seperti ini, terlihat jelas bahwa para birokrat cenderung melayani kepentingan penguasa, bukan kepentingan masyarakat. Budaya birokrasi semacam

ini juga menciptakan ciri pemerintahan yang bersifat patron-klien, di mana seorang penguasa berperan sebagai patron yang memberikan jabatan dan perlindungan kepada kliennya (bawahan), dengan imbalan loyalitas dan dedikasi dari klien tersebut.

Sejak masa reformasi tahun 1999, banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai reformasi birokrasi oleh para akademisi, peneliti pemerintah, dan lembaga swasta. Hasil-hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun begitu, dari penelitian yang telah dilakukan, masih terlihat kelemahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama terkait dengan tingkat akuntabilitas dan pencapaian tujuan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik KKN (Akbar et al., 2021). Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem reformasi birokrasi telah ada di Indonesia sejak penerapan sistem pemerintahan reformasi.

Istilah birokrasi di Indonesia seringkali dikenal sebagai konsep yang akrab dalam ranah keilmuan politik dan pemerintahan. Tak hanya di kalangan akademisi, tetapi juga di masyarakat umum, kata birokrasi telah menjadi bagian dari kosakata yang dikenal. Namun, sayangnya, dalam persepsi masyarakat, kata birokrasi seringkali dihubungkan dengan konotasi negatif. Ketika masyarakat mendengar kata birokrasi, mereka cenderung mengaitkannya dengan hal-hal yang kompleks, memakan biaya, praktik pungutan liar, korupsi, dan kurangnya disiplin.

Permasalahan tersebut tentunya sudah sejak lama bergejolak di Indonesia, birokrasi sering muncul dalam permasalahan publik yang erat kaitannya dengan aparat pemerintah yang sering sekali melakukan korupsi atau penggelapan uang. Selain itu juga permasalahannya terkait dengan pembangunan daerah yang berbelit-belit dan hal lainnya yang membutuhkan uang dalam penyelesaiannya yang menyebabkan masyarakat merasa tidak terima dengan adanya efek negatif birokrasi pemerintah itu.

Hal tersebut tentunya sangat penting untuk dibahas menjadi tema dalam literatur kajian keilmuan, karena sangat erat kaitannya dengan kemajuan pemerintahan Indonesia dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang ini, oleh karena itu penulis tertarik melakukan kajian ini agar dapat membahas lebih dalam lagi bagaimana peran birokrasi dalam reformasi pemerintahan di Indonesia.

## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, di mana data dikumpulkan dari buku-buku, laporan, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Fokus penelitian ini adalah peran birokrasi dalam reformasi pemerintahan Indonesia. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengandalkan data dari literatur yang telah ada. Model yang digunakan adalah literatur perpustakaan, dengan metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian sumber tertulis mengenai peran birokrasi dalam reformasi pemerintahan Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan temuan penelitian. Tahap awal penelitian melibatkan pengumpulan dan studi terhadap data dari penelitian sebelumnya oleh para peneliti lain. Data tersebut kemudian diperkaya dengan tambahan informasi dari jurnal, buku, dan sumber online. Setelah data terkumpul dan dipelajari, dilakukan pengolahan data dan analisis deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran birokrasi dalam reformasi pemerintahan Indonesia.

## **RESULTS**

### **Studi Kritis tentang Birokrasi Pemerintahan**

Birokrasi dianggap sebagai instrumen yang sangat penting bagi setiap negara, terutama dalam masyarakat modern seperti saat ini. Keberadaan birokrasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena merupakan konsekuensi alami dari tugas utama negara atau pemerintah untuk memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyat. Meskipun bagi sebagian orang birokrasi sering dianggap sebagai prosedur yang rumit, menyulitkan, dan menjengkelkan (Ramadhanti, 2018). dari sudut pandang positif, birokrasi dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih tertib dalam pengelolaan sumber daya yang ada dan

mendistribusikannya kepada seluruh anggota masyarakat (Ramadhanti, 2018; syarifuddin, 2023). Dengan demikian, birokrasi dapat dipahami sebagai suatu usaha dalam mengorganisir berbagai tugas agar dapat terselenggara secara teratur.

Istilah birokrasi dapat merujuk pada empat konsep yang berbeda. Pertama, mengacu pada kelompok lembaga atau pranata tertentu, seringkali disamakan dengan istilah "biro". Kedua, merujuk pada metode khusus yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dalam organisasi besar, sejalan dengan proses pengambilan keputusan birokratis. Ketiga, menyoroti aspek kebirokrasian atau kualitas yang membedakan birokrasi dari jenis organisasi lain biasanya mengacu pada sifat-sifat statis organisasi. Keempat, mengacu pada kelompok individu yang digaji dan memiliki fungsi dalam pemerintahan (Ramadhanti, 2018).

Birokrasi telah menjadi salah satu aspek kehidupan yang sangat signifikan sejak abad ke-19, memainkan peran penting dalam sejarah umat manusia. Jika ditanya tentang organisasi apa yang paling dibutuhkan dalam hidup, jawaban hampir pasti adalah "birokrasi" (Sri Chatun, 2022). Dari sebelum kelahiran hingga kematian, individu dalam masyarakat modern akan selalu berinteraksi dengan lembaga pemerintahan yang dikenal sebagai birokrasi. Contohnya, saat seseorang menikah di KUA, dokumen surat nikah dari KUA tersebut kemudian diperlukan untuk proses administrasi seperti pengurusan akta kelahiran.

Selama kehidupan manusia, interaksi dengan birokrasi tak pernah terputus. Bahkan sejak dalam kandungan, mereka mungkin memerlukan pemeriksaan di Puskesmas, yang merupakan bagian dari birokrasi. Saat individu bersekolah, bekerja, bepergian, berdagang, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya, mereka terus berhubungan dengan berbagai lembaga birokrasi seperti Dinas Pendidikan, Departemen Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Badan Pertanahan, dan lainnya. Bahkan setelah seseorang meninggal, masih ada keterlibatan dengan Dinas Pemakaman, yang juga merupakan bagian dari birokrasi. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa makna birokrasi adalah sebagai prosedur yang efektif memiliki aturan sesuai tujuan yang disepakati lembaga pemerintah. Birokrasi sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan aturan pemerintah, segala hal memakai birokrasi dalam pelaksanaannya.

### **Peran dan Fungsi Birokrasi Pemerintahan**

Peran dan fungsi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari konteks politik pemerintahan. Pada dasarnya, birokrasi diharapkan menjadi lembaga yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Setiap birokrat, sebagai bagian dari aparatur negara, dianggap sebagai pelayan publik yang harus memiliki kesadaran akan pentingnya memenuhi kepentingan masyarakat secara optimal (Yasa et al., 2021). Dengan demikian, orientasi kerja birokrasi seharusnya adalah memastikan kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama. Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa peran birokrasi sangat penting dalam memajukan dan mengembangkan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik (Mulyadi et al., 2023).

Peran birokrasi dalam bidang pendidikan juga penting, di mana mereka berperan sebagai pengawas dan pengatur dalam sistem pendidikan nasional (Sri Chatun, 2022). Mereka bertanggung jawab untuk mengontrol pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi pendidikan, serta memastikan bahwa proses pendidikan di setiap daerah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, peran birokrasi dalam mengawasi dan mengontrol pendidikan nasional Indonesia merupakan bagian integral dari fungsi birokrasi secara keseluruhan (Fatmawati, 2019).

Untuk meningkatkan kinerja birokrasi pendidikan, diperlukan program pembinaan yang profesional. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stigma bahwa birokrasi sulit untuk berubah dan cenderung konservatif dalam melaksanakan tugasnya. Melalui program ini, diharapkan birokrasi pendidikan dapat lebih responsif terhadap perubahan dan tuntutan zaman, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional (Atqia et al., 2024). Dengan demikian, peran birokrasi dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga melibatkan upaya untuk

meningkatkan kualitas pendidikan nasional sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Dwijayanti (2021) menyatakan terdapat empat fungsi Birokrasi yakni sebagai berikut:

<b>Fungsi Birokrasi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Fungsi Administrasi</b>	Melaksanakan hukum dan kebijakan birokrasi bertugas melaksanakan urusan pemerintahan. Inilah mengapa birokrasi kadang-kadang disebut sebagai "administrator", sedangkan eksekutif politik disebut "pemerintah"(Dwijayanti, 2021). Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara peran politisi pengambil kebijakan dan birokrat sebagai pelaksana kebijakan. Mayoritas pegawai negeri, atau pejabat, secara eksklusif terlibat dalam tanggung jawab administratif yang mencakup berbagai tugas mulai dari melaksanakan program kesejahteraan dan jaminan sosial hingga peraturan ekonomi, memberikan izin, dan memberikan informasi dan nasihat kepada warga negara baik di dalam negeri maupun internasional.
<b>Fungsi Artikulasi Kepentingan</b>	Birokrasi, meskipun tidak memiliki fungsi resmi, sering terlibat dalam mengartikulasikan kepentingan melalui implementasi kebijakan dan peranannya dalam merumuskan serta memberi nasihat tentang kebijakan
<b>Fungsi Stabilitas</b>	Birokrasi berfungsi memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam sistem politik, khususnya di negara berkembang, dengan memastikan pemerintahan berjalan teratur dan dapat diandalkan melalui pegawai negeri yang permanen dan profesional.
<b>Penasihat Kebijakan</b>	Signifikansi politik birokrasi terletak pada peran mereka sebagai penyedia informasi dan nasihat utama kepada pemerintah. Perbedaan peran ini membedakan pejabat senior, yang berinteraksi dengan politisi dan memberikan nasihat kebijakan, dari pejabat menengah yang menangani urusan administratif rutin. Perdebatan mengenai signifikansi politik birokrasi lebih fokus pada elit pejabat senior. Secara teoritis, kebijakan harus ditentukan oleh politisi, sementara birokrat hanya memberi nasihat.

**Tabel 1. Fungsi Birokrasi Pemerintahan**

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa peran dan fungsi birokrasi sangat penting dalam pemerintahan Indonesia, sebagai Negara dengan sistem politik yang demokrasi sejak berlakunya reformasi di Indonesia, Indonesia melaksanakan birokrasi sesuai aturan reformasi birokrasi yang berlaku dalam masyarakat.

### **Reformasi Birokrasi di Indonesia**

Birokrasi pada dasarnya bertindak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang dimana dalam proses penetapannya merupakan fungsi politik dan menjadi kewenangan pejabat politik(Yasa et al., 2021). Dalam konteks ini, seluruh individu atau pejabat dalam birokrasi pemerintahan bertugas sebagai pelaksana dari sebuah sistem yang tidak terikat pada kepentingan pribadi. Konsekuensinya, birokrasi pemerintahan berfungsi sebagai kekuatan netral yang tidak terpengaruh oleh berbagai kelompok atau golongan tertentu (Ramadhanti, 2018).

Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, birokrasi pemerintah belum sepenuhnya mampu bersikap netral. Hal ini tercermin dari sikap pejabat yang cenderung enggan bertindak tanpa persetujuan dari atasan mereka, yang mengakibatkan ketidakberanian untuk mengambil inisiatif. Situasi ini dapat menyebabkan inefisiensi dan menjadi penghambat dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Di Indonesia, reformasi birokrasi telah berlangsung sejak berakhirnya masa Orde Baru. Banyak pembenaran yang diajukan untuk menunjukkan bagaimana birokrasi di masa lalu di Indonesia masih berdampak pada budaya birokrasi Indonesia saat ini. Sejak abad pertengahan, budaya birokrasi telah berkembang di Indonesia dan terus memberikan pengaruh yang besar hingga saat ini. Patrimonialisme

adalah budaya patrimonial yang umum sepanjang era feodal, dan pejabat lebih cenderung melayani kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan rakyat.

Struktur birokrasi dari masa kerajaan dan kolonial mempunyai dampak yang signifikan terhadap birokrasi Indonesia secara umum, sehingga membuat reformasi menjadi sulit. Sejarah panjang birokrasi tidak dapat dilepaskan dari kewibawaan para birokrat pada masa lalu, termasuk pada pemerintahan kolonial dan birokrasi pada masa prakolonial (kerajaan). Kerangka birokrasi kolonial masih memberikan dampak yang kuat terhadap birokrasi modern, yang berkembang dari birokrasi masa lalu. Meskipun era kolonial meninggalkan praktik-praktik positif tertentu, seperti administrasi yang relatif bersih, tidak semua elemen ini digunakan dalam birokrasi saat ini, yang sering kali terdapat masalah korupsi (Kertati, 2021).

Permasalahan birokrasi yang terjadi di Indonesia pada saat ini, seperti yang kita ketahui, adalah mementingkan kepentingan pejabat pemerintah dibandingkan rakyat. Birokrasi lebih condong diposisikan sebagai pemberi perintah kepada rakyat (fungsi regulasi dan kontrol) daripada sebagai lembaga yang memiliki fungsi pelayanan publik. Tugas utama birokrasi adalah mematuhi tugas yang diperintahkan oleh birokrasi pusat, terutama dalam tugas-tugas yang erat kaitannya dengan penarikan pajak kepada rakyat (Maryam, 2016; Mulyadi et al., 2023; Rahardian, 2019).

Salah satu isu dalam birokrasi adalah praktik korupsi. Korupsi secara sistemik juga bisa disebabkan oleh dominasi posisi birokrasi pemerintah sebagai pemasok utama barang, jasa, lapangan kerja, dan regulator ekonomi. Posisi dominan negara yang mengatasi kekuatan lain dalam masyarakat membuat birokrasi memiliki kendali atas sebagian besar informasi kebijakan untuk memengaruhi opini public (Rusfiana & Supriatna, 2021).

Untuk menghadapi tantangan yang berasal dari permasalahan birokrasi yang telah berlangsung dari masa lalu hingga saat ini, diperlukan reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bertanggung jawab, bersih, dan transparan, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Birokrasi yang bertanggung jawab diharapkan dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil kerjanya dengan tepat kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia adalah bentuk prosedur pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan pelayanan public terhadap masyarakat. Namun, seringkali pejabat pemerintah menyalahgunakan birokrasi untuk kepentingan pribadi sehingga terjadi korupsi, pungli dan kegiatan negatif lainnya oleh aparatur pemerintahan yang memegang kendali birokrasi. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya pembaharuan atau reformasi birokrasi agar semua proses birokrasi dapat dilaksanakan secara transparan sebagai sebuah program pemerintah yang jujur dan adil serta mementingkan kepentingan rakyat Indonesia.

## CONCLUSIONS

Birokrasi adalah sebagai prosedur yang efektif memiliki aturan sesuai tujuan yang disepakati lembaga pemerintah. Birokrasi sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan aturan pemerintah, segala hal memakai birokrasi dalam pelaksanaannya. Peran dan fungsi birokrasi sangat penting dalam pemerintahan Indonesia, sebagai Negara dengan sistem politik yang demokrasi sejak berlakunya reformasi di Indonesia, Indonesia melaksanakan birokrasi sesuai aturan reformasi birokrasi yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi birokrasi yakni; (a) fungsi administrasi (b) fungsi artikulasi kepentingan (c) fungsi stabilitas dan (d) fungsi penasihat kebijakan. Reformasi birokrasi di Indonesia adalah bentuk prosedur pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan pelayanan public terhadap masyarakat. Perlu adanya pembaharuan atau reformasi birokrasi agar semua proses birokrasi dapat dilaksanakan secara transparan sebagai sebuah program pemerintah yang jujur dan adil serta mementingkan kepentingan rakyat Indonesia.

## REFERENCES

- Akbar, G. G., Rulandari, N., & Widaningsih, W. (2021). Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Literatur. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2). <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1981>
- Atqia, F., Zalikha, S. N., & Marzaniar, P. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Berkualitas di Pesantren Modern Provinsi Aceh. *Risenologi: Jurnal Sains, Teknologi, Sosial, Pendidikan, Dan Bahasa*, 9(2), 59–70.
- Damanhuri, D., & Jawandi, R. (2017). Reaktualisasi reformasi birokrasi menuju good governance. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*, 2(6).
- Dwijayanti, A. (2021). The Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1). <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.68>
- Fatmawati, E. (2019). Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Peran Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 1(1). <https://doi.org/10.35719/jieman.v1i1.10>
- Hodgetts, J. E. (1946). Administration and Politics: The Case of the Canadian Broadcasting Corporation. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 12(4). <https://doi.org/10.2307/137349>
- Kertati, I. (2021). Reformasi Birokrasi dan Perilaku Anti Korupsi. *Jurnal Media Administrasi*, 3(1).
- Maryam, N. S. (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2.133>
- Mulyadi, A., Dwisasti, T. A., & Rahmanasari, C. (2023). Mewujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia Melalui Rekrutmen Smart Asn Berakhlak Di Era 4.0. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 529–537. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5412>
- Rahardian, A. . (2019). REVITALISASI BIROKRASI MELALUI TRANSFORMASI BIROKRASI MENUJU E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Prosiding Seminar Stiami*, 6(1), 85–94.
- Ramadhanti, R. (2018). Politik dan Birokrasi Pemerintahan. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 2(1). <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1242>
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan. *Alfabeta Bandung*.
- Sri Chatun. (2022). Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah dan Birokrasi. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(10). <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1617>
- syarifuddin, S. (2023). Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia. *Osf.Io*.
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>